

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lainnya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan menurut asas atonomi dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada umumnya penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya.

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2007) laporan keuangan adalah “Informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. Laporan keuangan wajib dibuat oleh perusahaan maupun instansi pemerintah karena menurut Windiastuti (2013) “Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas”. Laporan keuangan Perusahaan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka.

Menurut Verinoca dan Utama (2007) berdasarkan jenisnya perusahaan di Indonesia dibedakan menjadi empat yaitu :

- a. Perusahaan Ekstraktif merupakan Jenis perusahaan yang kegiatannya langsung mengambil serta memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam seperti perusahaan pertambangan, penangkapan ikan di laut bebas, penebangan kayu legal, pengambilan rumput laut, dan lain sebagainya
- b. Perusahaan Manufaktur merupakan Jenis perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi sehingga dapat dijual kepada konsumen.
- c. Perusahaan Agraris merupakan Jenis perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam seperti perusahaan agro industri, perusahaan perkebunan, perusahaan perikanan darat, dan perusahaan peternakan.
- d. Perusahaan Jasa merupakan Jenis perusahaan yang menjual atau memberi jasa kepada pelanggan atau masyarakat seperti bank, asuransi, transportasi, kantor akuntan, dan lain sebagainya.

Laporan keuangan tersebut berupa laporan keuangan saja maupun laporan tahunan. Laporan keuangan secara umum terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang

merupakan bagian integral laporan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan terdapat pedoman yang menjadi acuan/standar yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan standar akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan Pengertian di atas dapat disintesis bahwa laporan keuangan merupakan sebuah media sebagai hasil pertanggung jawaban suatu entitas selama satu tahun periode yang isinya berupa informasi yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan secara umum terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral laporan keuangan.

2.1.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Prasetya (2005), Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggung jawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Menurut Nurillah (2014) Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan

- tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.
- c. Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar
 - e. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
 - f. Laporan Arus Kas Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan Negara.

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan pemerintah. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Andini & Yusrawati (2015). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari badan pengawas keuangan (BPK). Terdapat 4 opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). (<http://www.bpk.go.id>)

2.1.2.2 Kualitas laporan keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Sedangkan menurut Mahmudi (2007) “Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

Karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 disebutkan yakni:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*).
Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

- a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)
Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
 - b. Netral
Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
 - c. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)
Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.
3. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
 4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Nawawi (2000) dalam Erinda (2017) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia meliputi 3 (tiga) pengertian, yakni:

- a. Sumber daya manusia ialah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut sebagai tenaga kerja, personel, pegawai, atau karyawan
- b. Sumber daya manusia ialah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya
- c. Sumber daya manusia ialah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik maupun non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan suatu instansi ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik dapat mempengaruhi suatu instansi mencapai tujuan dengan baik, efektif dan efisien. Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi. Pendidikan dibagi menjadi: pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Pelatihan yang diberikan tenaga ahli,

pelatihan yang tepat, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

Manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi fungsi guna mencapai tujuannya. “Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi” (Warih Komarasari, 2011). Berdasarkan Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007 Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Hadi, (2015), “Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas sumber daya manusia dari setiap organisasi”. Baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Pengetahuan disini dimaksudkan dalam arti luas yaitu kemampuan sumber daya manusia yang tercermin dari kinerjanya dan terlihat dari perilaku kerjanya yang kompeten, cepat, dan inovatif serta dorongan yang kuat untuk belajar. Menurut Nurillah, (2014) Kompetensi sumber daya manusia adalah “kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien”.

Menurut Indriasari dan Nurillah, (2014) kapasitas sumber daya manusia adalah : Kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesis bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan suatu individu atau seseorang dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan atau hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kompetensi sumber daya manusia dapat berupa keterampilan, pendidikan, pelatihan serta sikap suatu individu dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan suatu organisasi.

2.1.3.1 Dimensi Sumber Daya Manusia

Menurut Notoatmodjo (2003), “ukuran sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman”. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya.

Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi produktivitas menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009) dalam Sunyoto (2012) meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), kemampuan (*abilities*), sikap (*attitude*), maupun perilaku (*behavior*). Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik serta produktif. Keterampilan berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis. Kemampuan (*abilities*) tercipta dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Mahmudi (2011), Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat *insidental and responsive* atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern adalah :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Dalam sistem pengendalian intern terdapat berbagai macam kebijakan, meliputi :

1. Terkait dengan catatan keuangan.
2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai.
3. Memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah.

Menurut Nur Afrida, (2013) menyatakan bahwa :

Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesisakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses perencanaan yang di lakukan secara terus menerus dengan tujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan suatu instansi pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien. SPI bertujuan untuk mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.4.1 Dimensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian.
 1. Penegakan integritas dan nilai etika.
 2. Komitmen terhadap kompetensi.
 3. Kepemimpinan yang kondusif.
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 6. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 7. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- b. Penilaian Risiko.
 1. Identifikasi Resiko.
 2. Analisis Resiko.
- c. Kegiatan Pengendalian.
 1. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
 2. Pembinaan sumber daya manusia.
 3. Pengendalian atas peneglolaan sistem informasi.
 4. Penetapan review atas indikator dan ukuran kerja.
 5. Pemisahan fungsi.
 6. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
 7. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
 8. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
 9. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Nurillah, 2014).

Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya :

- a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini.

Pentingnya pemanfaatan teknologi dapat meminimalisir kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal. Menurut

Febriady Leonard, (2013) “Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliable (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia” Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks.

Berdasarkan definisi tersebut pemanfaatan teknologi informasi merupakan alat pengolah data, informasi dan sistem manajemen serta proses kerja elektronik yang di gunakan untuk membantu pekerjaan yang kompleks agar mendapatkan hasil yang lebih reliable dalam kurun waktu yang relatif cepat. Pemanfaatan teknologi dapat meminimalisir kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal

2.1.5.1 Unsur Teknologi Informasi

Menurut Abdul dan Terra (2013) teknologi informasi ialah “Teknologi Informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perangkat lunak (*Software*) dan perangkat keras (*hardware*)”. Perangkat keras menyangkut peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer dan keyboard. Perangkat lunak meliputi instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut.

Menurut Primayana, dkk. (2014) menyatakan tentang perubahan terkait pola penyusunan laporan keuangan yaitu :

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA (TAHUN)	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Fitrini Mansura, Eko Prasetyob, (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y = nilai informasi pelaporan keuangan daerah X1=Pengawasan Keuangan Daerah X2 = Sumber Daya Manusia X3 = Teknologi Informasi X4 = Sistem Pengendalian Intern	Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Riskhi Diah (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Y = nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah X1 = sumber daya manusia, X2 = pemanfaatan teknologi informasi	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri

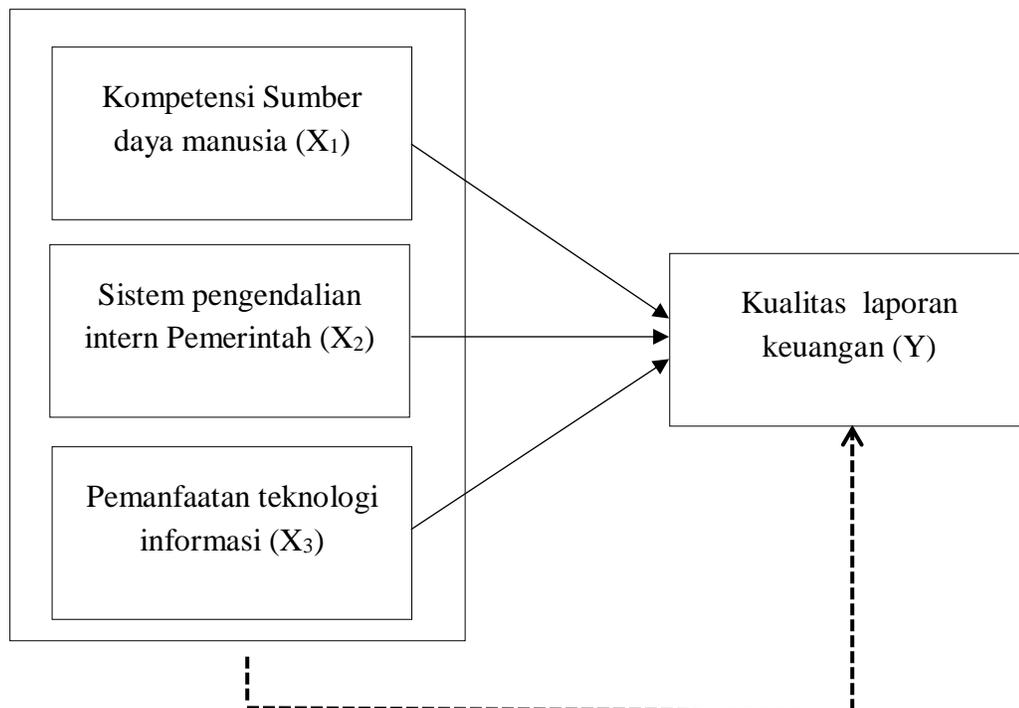
NO	NAMA (TAHUN)	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		Wonogiri	X3 = pengendalian intern akuntansi	
3	Warih Komarasari (2017)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penge intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)	Y = keterandalan pelaporan keuangan daerah X1 = kapasitas sumber daya manusia X2 = Teknologi informasi X3 = Pengendalian intern akuntansi	Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4	Nonie Erinda (2017)	Pengaruh pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.	Y = kualitas laporan keuangan di Kabupaten X1 = Pengendalian intern, X2 = pemanfaatan teknologi informasi X3 = kompetensi sumber daya manusia Z = komitmen organisasi	Pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

NO	NAMA (TAHUN)	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
			sebagai variabel moderating.	
5	Utary (2015)	Pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan menggunakan faktor eksternal sebagai moderasi.	Y = kualitas laporan keuangan daerah X1 = sistem informasi akuntansi, X2 = sistem pengendalian intern X3 = kompetensi sumber daya manusia Z = faktor eksternal	Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah
6	Kiranayanti & Erawati, (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern. Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Y = Kualitas Laporan Keuangan X1 = Sumber daya Manusia X2 = Sistem Pengendalian Intern X3 = Pemahaman Basis akruaI	Sumber daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman basis akruaI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber : Data yang diolah, 2018

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir untuk variabel bebas yaitu kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemanfaatan teknologi informasi serta variabel terikat yaitu keandalan laporan keuangan. Dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber : Data yang diolah, 2018

Keterangan :

————— : Pengaruh secara Parsial

----- : Pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan tersebut sebelumnya telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Diduga kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah.
- H₂ : Diduga pemanfaatan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- H₃ : Diduga penerapan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
- H₄ : Diduga kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.